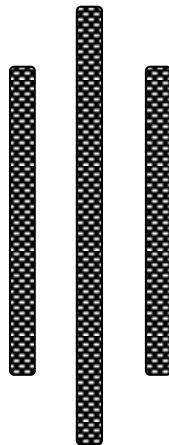




# **RENCANA KERJA ( RENJA )**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Alamat Jalan Mayor Sugianyar No.19  
Telp.(0365) 4545120 Fax .(0365) 4545122 Kode Pos. 82218  
**NEGARA**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR 24.1 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBRANA**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab maka dipandang perlu untuk penyusunan Rencana Kerja untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

3. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ;(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021
- KEDUA : Penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dimaksud dalam diktum PERTAMA disusun berdasarkan pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Naskah Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Negara,  
Pada tanggal 5 Maret 2020.

**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Jembrana,**

**I DEWA GDE KUSUMA ANTARA, SE.M.Si.**

NIP.19691119 199603 1 006

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara, sebagai laporan,
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan,
5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Satuan dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana di Negara, sebagai laporan



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi WaÇa karena atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, buku Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021.

Renja OPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat digunakan :

1. Acuan Kerja Pelaksana Kegiatan bagi Aparatur dalam melaksanakan tugas agar lebih terarah, realistis dan terpadu
2. Acuan bagi semua Stakeholder yang berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Acuan dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring, berbagai program pengembangan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan bertanggung jawab pada kemajuan, pengembangan dibidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat mendukung pelaksanaan renja OPD ini secara konsisten sesuai dengan peran dan misi masing masing.

Semoga Renja OPD yang telah disusun ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Negara, 5 Maret 2020  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,

**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si**  
Nip. 19691119 199603 1 006

# DAFTAR ISI

## SK RENJA

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja .....	9
2.2. Analisis Kinerja .....	12
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	28
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tahun 2021 .....	30
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	36

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	43
4.2. Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif...	49

### BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja OPD, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam hal ini Kabupaten Jembrana memenuhi ketentuan tersebut dengan menyusun RPJMD tahun 2016-2021. RPJMD ini akan menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016 – 2021.

Untuk mengarah terwujudnya upaya pencapaian visi dan misi perlu adanya penyusunan Rencana Kerja( Renja ) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode (1) satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan dan perumusan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana kerja (Renja ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang definitive. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
2. Kewenangan organisasi sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016.
3. Tugas Pokok dan fungsi organisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Kondisi internal organisasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), perlengkapan, anggaran, serta metode kerja.
5. Kondisi eksternal organisasi yang meliputi kebijakan bidang pajak daerah / retribusi daerah, perekonomian dan hubungan kerja antar SKPD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD maupun selaku SKPKD mempunyai kewajiban memberikan kontribusi terhadap tercapainya visi Kabupaten Jembrana tahun 2016 – 2021

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 ini, Sejumlah Peraturan digunakan sebagai acuan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
2. Menyediakan satu tolok ukur bagi pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Dokumen Perencanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 5 (lima) Tahun sejak 2016 sampai dengan tahun 2021.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. **Kepala Badan.**
- b. **Sekretariat** yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yakni : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan;
- c. **Bidang PBB-P2 dan BPHTB** terdiri dari Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB; Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB;

- d. **Bidang Pajak Daerah Lainnya** terdiri dari Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya; Sub Bidang Penetapan Pajak daerah Lainnya; dan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah Lainnya;
- e. **Bidang Perbendaharaan** terdiri dari Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Non Gaji; Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Belanja Gaji;
- f. **Bidang Anggaran** terdiri dari Sub Bidang Anggaran Pendapatan; Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
- g. **Bidang Aset** terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset; Sub Bidang Penatausahaan Persediaan dan Aset Lain-lain; dan Sub Bidang Penatausahaan Aset Tetap;
- h. **Bidang Akutansi dan Pelaporan** terdiri dari Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah; Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Belanja Daerah dan Sub Bidang Laporan Keuangan Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penyusunan Renja.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD serta Program dan Kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sebagai salah satu pelaksana kewenangan daerah otonom sesuai menjalankan 1 (dua) urusan guna memberikan pelayanan prima kepada publik yaitu urusan Penunjang Keuangan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. Dan Realisasi Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau realisasi keuangan fisik kegiatan APBD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 dengan 6 Program dan 30 Kegiatan yang telah dilaksanakan.

Total Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2019 sebesar Rp. 14.724.956.947,00 yang terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.237.839.808,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.462.537.948,00 (89,29%)

- 2) Belanja Langsung sebesar Rp. 7.487.117.139,00 dengan ralisasi sebesar Rp. 6.965.178.991 (93,03%)

Rincian realisasi Belanja Tidak Langsung dan rincian realisasi capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Belanja Langsung**

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (Rp)	REALISASI		
			FISIK (%)	Keu (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>7,487,117,139.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,965,178,991.00</b>	<b>93.03</b>
<b>1</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>681,056,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>652,079,159.00</b>	<b>95.75</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	5,600,000.00	100.00	5,579,000.00	99.63
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,450,000.00	100.00	19,000,341.00	64.52
	3 Penyediaan alat Tulis Kantor	52,780,000.00	100.00	52,522,000.00	99.51
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,780,000.00	100.00	17,688,600.00	94.19
	5 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12,240,000.00	100.00	12,220,000.00	99.84
	6 Penyediaan makanan dan minuman	72,066,000.00	100.00	65,507,000.00	90.90
	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	376,140,000.00	100.00	375,662,418.00	99.87
	8 Penyelenggaraan Upakara/Upacara Keagamaan	114,000,000.00	100.00	103,899,800.00	91.14
<b>2</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>504,713,749.00</b>	<b>100.00</b>	<b>497,556,134.00</b>	<b>98.58</b>
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	211,596,400.00	100.00	211,291,105.00	99.86
	2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	198,625,000.00	100.00	196,818,029.00	99.09
	3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	9,250,000.00	100.00	8,500,000.00	91.89

	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	85,242,349.00	100.00	80,947,000.00	94.96
<b>3</b>		<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>82,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>81,100,000.00</b>	<b>98.30</b>
	1	pengandaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	38,500,000.00	100.00	37,100,000.00	96.36
	1	pengandaan pakaian khusus hari-hari tertentu	44,000,000.00	100.00	44,000,000.00	100.00
<b>4</b>		<b>PROGRAM: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>427,189,900.00</b>	<b>100.00</b>	<b>385,859,008.50</b>	<b>90.32</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	116,463,100.00	100.00	105,503,000.00	90.59
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	67,191,000.00	100.00	61,013,000.00	90.81
	3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	243,535,800.00	100.00	219,343,008.50	90.07
<b>5</b>		<b>PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.</b>	<b>5,553,579,490.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,119,865,873.50</b>	<b>91.46</b>
	1	Penyusunan Standard Satuan Harga	64,803,200.00	100.00	40,803,200.00	62.96
	2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	501,520,000.00	100.00	498,520,000.00	99.40
	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	174,330,000.00	100.00	146,264,969.50	83.90
	4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	498,750,000.00	100.00	493,750,000.00	99.00
	5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	125,922,600.00	100.00	125,907,600.00	99.99
	6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	91,838,000.00	100.00	88,074,400.00	95.90
	7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	110,447,000.00	100.00	105,036,000.00	95.10
	8	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah	545,511,200.00	100.00	495,311,400.00	90.80

	9	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB	2,056,523,200.00	100.00	1,986,612,500.00	96.60
	10	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD	246,273,000.00	100.00	240,067,500.00	97.48
	11	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari Pajak Daerah Lainnya	1,086,732,650.00	100.00	849,527,664.00	78.17
	12	Pengelolaan Gaji PNSD	50,928,640.00	100.00	49,990,640.00	98.16
<b>6</b>	<b>PROGRAM : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota</b>		<b>238,078,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>228,718,816.00</b>	<b>96.07</b>
	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	238,078,000.00	100.00	228,718,816.00	96.07
<b>JUMLAH</b>			<b>7,487,117,139.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,965,178,991.00</b>	<b>93.03</b>

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2019 dapat dilihat pada **lampiran Table T.C.29**

## 2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Analisis kinerja atas layanan Urusan penunjang keuangan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan indikator urusan meliputi :

### Keuangan

#### 1) Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Dokumen APBD dan Perubahan APBD.

Capaian kinerja ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD dan perubahan APBD dihitung nilai yang diperoleh hasil tanggal penyampaian RAPBD/P dan nota

kesepakatan. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD dan perubahan APBD

Tahun Periode		Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana			
No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD dan perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Ketepatan waktu penetapan APBD dan PAPBD diukur dari Prosentase Capaian kinerja yang dihasilkan, maka indikator yang memiliki target 100% ini pada tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 100%

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Dokumen APBD dan Perubahan APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD dan perubahan APBD	4 dok.	4 dok.	1.521.795.600	1.546.795.600	1.504.510.069.50	42.285.530.50

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Penyusunan belanja langsung dan jumlah penyusunan Belanja tidak langsung	2 perda dan 2 pwrbup	2 perda dan 2 perbup	489.520.000	501.520.000	498.520.000	3.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah penyusunan belanja langsung dan penyusunan belanja Tidak langsung	2 perda dan 2 Perbup	2 Perda Dan 2 Perbup	174.330.000	174.330.000	146.264.969.50	28.056.030.50
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah penyusunan belanja langsung dan jumlah penyusunan belanja tidak langsung	2 perda dan Perbup	2 Perda dan 2 Perbup	510.750.000	498.750.000	493.750.000	5.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah penyusunan belanja langsung dan jumlah penyusunan belanja tidak langsung	2 perda dan 2 perda	2 perda dan 2 perbup	148.554.600	125.922.600	125.907.600	15.000
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD	Jumlah Penyusunan Belanja Langsung dan Jumlah Penyusunan Belanja tidak Langsung	2 Perda dan 2 Perbup	2 Perda dan 2 Pwrbup	198.641.000	246.273.000	240.067.500	6.205.500

## 2) Ketepatan Waktu dalam pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan Belanja APBD.

Capaian kinerja ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan belanja APBD dihitung nilai yang diperoleh jumlah SP2D dengan sumber dana dan kode rekening, yang tepat waktu dibagi jumlah seluruh SP2D di kali 100. Capaian kinerja

dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan belanja APBD  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan belanja APBD	100%	100%	100%	100%

Dari data tersebut di atas bahwa Ketepatan waktu dalam pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan Belanja APBD memiliki target 100 % dengan Realisasi Pada tahun 2019 sebesar 100 % Tahun 2019 Realisasi SPM yang diajukan oleh OPD sebanyak 11.017 SPM dan telah diterbitkan SP2D tepat waktu sebanyak 11.017 SP2D (100%), untuk Realisasi 2019 SPM yang diajukan sebanyak 11.017 SP2D ( 100%).

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Keuangan Atas Pelaksanaan Belanja APBD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan**

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perosentase OPD tertib Administrsi Pentausahaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	50.928.640	50.928.640	49.990.640	938.000
Pengelolaan Gaji PNSD	Jumlah OPD tertib Adminitrasi Belanja Gaji dan Tunjangan dan Jumlah OPD OPD yang menyampaikan Belanja	37 OPD	37 OPD	50.928.640	50.928.640	49.990.640	938.000

	langsung tepat waktu						
<b>Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten /Kota</b>	<b>Prosentase OPD Tertib Administrasi Pentausahaan Keuangan Daerah</b>	<b>37 OPD</b>	<b>37 OPD</b>	<b>238.078.000</b>	<b>238.078.000</b>	<b>228.718.816</b>	<b>9.359.184</b>
Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah OPD tertib Administrasi penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan	37 OPD	37 OPD	238.078.000	238.078.000	228.718.816	9.359.184

### 3) Prosentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi

Capaian kinerja Prosentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi dihitung nilai yang diperoleh jumlah OPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6  
Prosentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Prosentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi	100%	100%	100%	100%

Dari data tersebut di atas bahwa Prosentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 dengan Target 100% dengan realisasi 100%. Capaian kinerja tidak mengalami Perubahan serta didukung Aplikasi SIMDA BMD.



Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Prosentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2018		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
<b>PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase OPD tertib Administrasi Penatausahaan asset Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>481.064.400</b>	<b>610.314.400</b>	<b>536.114.600</b>	<b>74.199.800</b>
Penyusunan Standard satuan Harga	Jumlah Penyusunan buku pedoman standarisasi satuan harga tepat waktu	200 Buku	200 bku	64.803.200	64.803.200	40.803.200	24.000.000
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah OPD tertib Adminstrasi Penatausahaan Aset Tetap	37 OPD	37 OPD	416.261.200	545.511.200	495.311.400	50.199.800

#### **4) Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**

Capaian kinerja Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dihitung nilai yang diperoleh jumlah OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Ketepatan waktu dalam pengelolaan Keuangan atas Pertanggungjawaban APBD perkembangan setiap tahun tidak mengalami perubahan dari tahun 2016 s/d 2019 dari target 100% dengan realisasi 100%.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas pertanggungjawaban APBD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.9**  
**Program dan Kegiatan**

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>257.683.800</b>	<b>243.535.800</b>	<b>219.343.008.50</b>	<b>24.192.791.50</b>
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	257.683.800	243.535.800	219.343.008.50	24.192.791.50

<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah OPD yang Menyampaikan laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>37 OPD</b>	<b>37 OPD</b>	<b>188.137.000</b>	<b>202.285.000</b>	<b>193.110.400</b>	<b>9.174.600</b>
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Berita acara Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	37 OPD	37 OPD	91.838.000	91.838.000	88.074.400	3.763.600
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Berita acara rekonsiliasi Belanja Daerah	37 OPD	37 OPD	96.299.000	110.447.000	105.036.000	5.411.000

### 5) Prosentase Peningkatan Penerimaan dari Pajak Daerah lainnya

Capaian kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan dari Pajak Daerah lainnya dihitung nilai yang diperoleh jumlah realisasi penerimaan di tahun berjalan dibagi jumlah target penerimaan di awal tahun RPJMD 2019 dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10  
Prosentase peningkatan penerimaan dari pajak daerah lainnya  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Prosentase peningkatan penerimaan dari pajak daerah lainnya	20%	22%	24%	26%

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Prosentase Peningkatan Penerimaan dari pajak daerah lainnya perkembangan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun 2016 s/d 2019 dari target 20% menjadi 26%.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan dari pajak daerah lainnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
<b>PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan penerimaan dari Pajak Daerah Lainnya</b>	<b>26 %</b>	<b>109,41%</b>	<b>896.236.650</b>	<b>1.086.732.650</b>	<b>849.527.664</b>	<b>237.204.986</b>
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari Pajak Daerah Lainnya	Terselenggarakan pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya	12 bulan	12 bulan	896.236.650	1.086.732.650	849.527.664	237.204.986

#### 6) Prosentase Peningkatan Penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB

Capaian kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan dari PBB-P2 dan BPHT dihitung nilai yang diperoleh jumlah realisasi penerimaan di tahun berjalan dibagi jumlah target penerimaan di awal tahun RPJMD 2019 dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12  
Prosentase peningkatan penerimaan dari pajak daerah lainnya  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Prosentase peningkatan penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB	20%	22 %	24%	26%

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Prosentase Peningkatan Penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB perkembangan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun 2016 s/d 2019 dari target 20% menjadi 26%.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.13  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
<b>PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan penerimaan dari PBB-P2 dan BPHTB</b>	<b>24 %</b>	<b>32,78 %</b>	<b>2.056.523.200</b>	<b>2.056.523.200</b>	<b>1.986.612.500</b>	<b>69.910.700</b>
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB	Terselenggara nya pendaftaran dan pendataan potensi PBB-P2 dan BPHTB	12 bulan	12 bulan	2.056.523.200	2.056.523.200	1.986.612.500	69.910.700

#### **7) Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu**

Capaian kinerja Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu dihitung nilai yang

diperoleh jumlah wajib pajak daerah lainnya yang membayar pajak tepat waktu dibagi jumlah wajib pajak daerah lainnya dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14  
Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	80%	82%	84%	86%

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu perkembangan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun 2016 s/d 2019 dari target 80% menjadi 86%.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.15  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
Program Peningkatan dan Pengembangan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	86%	85,67 %	896.236.650	1.086.732.650	849.527.664	237.204.986

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari Pajak Daerah Lainnya	Terselengaran ya pendaftaran dan pendataan pajak daerah lainnya	12 bulan	12 bulan	896.236.650	1.086.732.650	849.527.664	237.204.986
---	---	----------	----------	-------------	---------------	-------------	-------------

## 8) Prosentase Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu

Capaian kinerja Prosentase Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu dihitung nilai yang diperoleh jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang membayar pajak tepat waktu dibagi jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB dikali 100. Capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16  
Prosentase Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu  
Tahun Periode Tahun 2016 s.d 2019 Kabupaten Jembrana

No	Uraian	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
a	Prosentase Wajib PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	80%	82%	84%	86%

Dari data tersebut di atas bahwa perkembangan dari tahun 2016 sampai 2019 terkait dengan Prosentase Wajib PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu perkembangan setiap tahun mengalami perubahan dari tahun 2016 s/d 2019 dari target 80% menjadi 86% Program dan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Prosentase Wajib PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.17  
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Indikator	Tahun 2019		Anggaran		Realisasi Anggaran	Silva
		Target	Realisasi	Induk	Perubahan		
<b>PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase Wajib PBB-P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu</b>	<b>86 %</b>	<b>46,38%</b>	<b>2.056.523.200</b>	<b>2.056.523.200</b>	<b>1.986.612.500</b>	<b>69.910.700</b>
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB	Terselenggarakan ya pendaftaran dan pendataan potensi PBB-P2 dan BPHTB	12 bulan	12 bulan	2.056.523.200	2.056.523.200	1.986.612.500	69.910.700

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan guna menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi. Proses dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja dalam memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja meliputi indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :



- 1) Indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan sasaran agar dapat dicapai, dikelompokkan dalam 4 kategori capaian kinerja yaitu :
  - a. < 55% Kategori kurang berhasil
  - b. 55 % - 70 % Kategori cukup berhasil
  - c. 71 % - 85 % Kategori berhasil
  - d. 86 % - 100% Kategori sangat berhasil
- 2) Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri dari :
  - a. Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
  - b. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan (input) baik berupa fisik maupun non fisik
  - c. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
  - d. Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan atau sebagai nilai tambah bagi masyarakat maupun pemerintah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan dari target masing-masing indikator pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, dengan hasil analisis dapat dilihat pada **lampiran Tabel T-C.30**

Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.26**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Dokumen APBD dan Perubahan APBD	4 Dok APBD 2018 28-12-2017 PAPBD 2017 3-10-2018	4 Dok APBD 2018 28-12-2017 PAPBD 2017 3-10-2018	100%			
		Ketepatan Waktu dalam pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan Belanja APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Laporan Barang Milik Daerah ( BMD ) OPD yang terkonsolidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Pertanggung jawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan dari Pajak Daerah lainnya.	24%	32,78%	136,58 %	26%		
		Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dari PBB P2 dan BPHTB	24%	19.54%	84,41%	26%		
		Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan kewajiban tepat waktu.	86%	85,67%	99,61%	86%		
		Prosentase Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	86%	46,38%	53,93%	86%		

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Perumusan isu-isu strategis dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, antara lain :

- a. Peningkatan Pendapatan Daerah dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Peningkatan pengelolaan Barang Milik Daerah / aset pemerintah daerah yang didukung dokumen-dokumen yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- e. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018.
- f. Penerapan sisten informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.
- g. Terbitnya undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

h. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2020. Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana menetapkan 4 (empat) Program 9 (sembilan) Kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp.150.787.769.469,40 (Seratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen)** Rancangan Awal RKPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, dapat dilihat pada **lampiran Tabel T-C.31**

#### **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2021 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional:

##### Identifikasi Kebijakan Nasional:

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	

3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember, maka dalam menyusun program kegiatannya BPKAD mengacu pada kebijakan nasional **“Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”**, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ ( Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Visi Kabupaten Jember ***“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan sumber Daya menuju Masyarakat Jember yang Sejahtera”***

Dari visi pembangunan tersebut ditetapkan 3 misi Kabupaten yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul,
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber Daya ekonomi dan Sumber daya alam,

3. Melakukan berbagai inovasi dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.

Dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Jembrana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Misi Ketiga Kabupaten Jembrana yaitu ***Melakukan berbagai inovasi dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.***

Terkait dengan pelaksanaan Visi ketiga Kabupaten Jembrana, dimana perumusan Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2016 yang menggambarkan : Apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas dan mampu menjadi perekat komponen Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, menumbuhkan komitmen seluruh jajaran serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana disusun sebagai berikut :

***Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib Transparan dan Akuntabel dengan Memanfaatkan IPTEK untuk menunjang Pembangunan Daerah menuju Masyarakat yang Sejahtera.***

Penjelasan Makna Visi :

*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib*

*Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dapat dikatakan tertib apabila memenuhi kriteria tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang transparan*

*Hasil pemungutan Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dan pengelolaan aset daerah harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Sehingga secara langsung dan tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel*

*Dalam melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas (potensi) maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya yang digunakan dan adan konsistensi terhadap hasil-hasil pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara.*

*Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan memanfaatkan IPTEK*

*Dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat memudahkan dalam operasional pencapaian kinerja.*



Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan tugas pemerintah.

Adapun **Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten** Jembrana dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dengan memanfaatkan IPTEK

Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam tahun 2021 adalah :

- a. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah

Berikut diuraikan keterkaitan antara Misi dengan Tujuan Prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.1

Keterkaitan Misi Kabupaten Jembrana dan Tujuan Prioritas  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

<b>Misi Ketiga Kabupaten</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>
Melakukan berbagai inovasi dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis Research dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.	1. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	1. Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
	2. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah	1. Prosentase peningkatan penerimaan PAD 2. Prosentase peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun ).

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal- hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berikut diuraikan Tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sebagai Tabel berikut:

Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Strategis  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
				2016	2017	2018	2019	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu dalam Pengelolaan Keuangan atas Dokumen APBD dan Perubahan APBD	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
			Ketepatan Waktu dalam pengelolaan Keuangan atas Pelaksanaan Belanja APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Lapoaran Barang Milik Daerah ( BMD ) OPD yang terkonsolidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu dalam Pengelolaan Keuaangan atas Pertanggung jawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan dari Pajak Daerah lainnya.	20%	22%	24%	26%	28%	30%
			Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dari PBB P2 dan BPHTB	20%	22%	24%	26%	28%	30%
			Prosentase Wajib Pajak Daerah Lainnya yang melaksanakan	80%	82%	84%	86%	88%	90%

			kewajiban tepat waktu.						
			Prosentase Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	80%	82%	84%	86%	88%	90%

**Sasaran Strategis** yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada Bappeda Litbang Kabupaten Jembrana tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Bappeda Litbang, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD Setiap program dan kegiatan

ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan yaitu :

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

### **3. Administrasi Umum**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
- d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
- e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- g. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
- h. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
- i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

### **2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- c. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- d. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
- e. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan

Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP

- f. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
- g. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- i. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
- j. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
- e. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- i. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

#### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
- b. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah



- g. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- j. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- k. Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

- a. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
- d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- f. Pemeriksaan Pajak Daerah
- g. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program dan Kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 tertuang selengkapnya pada **Lampiran Tabel 3.3 Matrik Renja :**

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Renja Tahun 2021 merupakan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja tahun 2021 merupakan bahan usulan dalam menyusun kebijakan pembangunan, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
2. Pada akhir tahun anggaran 2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

Rencana Program/Kegiatan, serta indikator kinerja dan Pendanaan yang disusun dalam Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun, mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa interaksi dan

penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana.

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama – sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan public.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, mempunyai 1 (satu) urusan penunjang dengan 4 (empat) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan pagu anggaran yang ada, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. Administrasi Keuangan**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

### **3. Administrasi Umum**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### **1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

- a. Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
- d. Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
- e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
- f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
- g. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
- h. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran

- i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

## **2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- c. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- d. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
- e. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
- f. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
- g. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- h. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- i. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
- j. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
- e. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- f. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- i. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

#### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang

- b. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- h. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- i. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- j. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- k. Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD

#### **4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

##### **1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**

- a. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- c. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
- d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- f. Pemeriksaan Pajak Daerah
- g. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

#### **4.2 Indikator Kinerja, Program, Kegiatan, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.**

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021.

Renja Tahun 2021 menjelaskan prioritas tujuan dan sasaran strategis yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2021 dengan program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan dan perkiraan pagu indikatif yang diperlukan untuk pendanaanya.

Indikator kinerja program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana disusun dengan memperhatikan indikator kinerja program dan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana, perumusan indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, dilakukan dengan mempertimbangkan pada perumusan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Jemberana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana amanat dalam RPJMD, Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana tahun 2018. Mudah-mudahan target yang direncanakan tahun 2021 dapat direalisasikan melalui dari program/kegiatan prioritas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana. Rencana Kerja ini selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan program/kegiatan selama tahun 2021 dan juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai di tahun 2021 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya. Dalam kaitan itu, maka perlu dukungan masyarakat sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran, karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2021 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini disusun, dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan/kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana pada tahun-tahun berikutnya.

Negara, 5 Maret 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana

**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si**

NIP. 19691119 199603 1 006

# LAMPIRAN

## RENJA

Tabel T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)\* Kabupaten Jembrana**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 ( n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang									
4	Keuangan									
4.04.4.04.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		6,926,926,117.84	6,450,671,681	7,487,117,039	6,965,178,991	93.03	7,142,371,139	20,558,221,811	2.97
4.04.4.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun	695,824,500.00	604,971,735	681,056,000	652,079,159	95.75	681,056,000	1,938,106,894	2.79
4.04.4.04.01.01.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah tersedianya paket pengiriman	8,360,000.00	5,236,500	5,600,000	5,579,000	99.63	5,600,000	16,415,500	1.96
		Jumlah tersedianya materi								
4.04.4.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan komunikasi yang memadai	29,450,000.00	21,461,071	29,450,000	19,000,341	64.52	29,450,000	69,911,412	2.37
4.04.4.04.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya tenaga cleaning service							-	
4.04.4.04.01.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	52,968,500.00	46,507,500	52,780,000	52,522,000	99.51	52,780,000	151,809,500	2.87
		Jumlah Flash Disk yang tersedia								
4.04.4.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	30,600,000.00	17,181,500	18,780,000	17,688,600	94.19	18,780,000	53,650,100	1.75
		Jumlah foto copy yang tersedia								
4.04.4.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor	Jumlah jenis alat listrik penerangan bangunan kantor	12,240,000.00	12,240,000	12,240,000	12,220,000	99.84	12,240,000	36,700,000	3.00
4.04.4.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum rapat	72,066,000.00	80,013,000	72,066,000	65,507,000	90.90	72,066,000	217,586,000	3.02

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah makan dan minum tamu								
4.04.4.04.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat/kooordinasi/ konsultasi	376,140,000.00	347,324,464	376,140,000	375,662,418	99.87	376,140,000	1,099,126,882	2.92
4.04.4.04.01.01.20	Penyediaan upacara/upakara keagamaan	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan dan pelaksanaan tirta yatra	114,000,000.00	75,007,700	114,000,000	103,899,800	91.14	114,000,000	292,907,500	2.57
<b>4.04.4.04.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>484,527,349.00</b>	<b>587,746,122</b>	<b>504,713,749</b>	<b>497,556,134</b>	<b>98.58</b>	<b>504,713,749</b>	1,590,016,005	3.28
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			223,000,000			#DIV/0!		223,000,000	
4.04.4.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Jumlah tersedianya jasa cleaning service	224,952,349.00	42,471,000.00	211,596,400	211,291,105	99.86	211,596,400	465,358,505	2.07
		Jumlah tersedianya alat kebersihan kantor								
4.04.4.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	198,625,000.00	191,126,122	198,625,000	196,818,029	99.09	198,625,000	586,569,151	2.95
		Jumlah BBM untuk operasional yang diadakan								
4.04.4.04.01.02.26	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	10,000,000.00	13,350,000.00	9,250,000	8,500,000.00	91.89	9,250,000	31,100,000	3.11
4.04.4.04.01.02.28	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis /di perbaiki	50,950,000.00	117,799,000	85,242,349	80,947,000	94.96	85,242,349	283,988,349	5.57
		Jumlah pemeliharaan gedung								
<b>4.04.4.04.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000</b>	<b>82,500,000</b>	<b>81,100,000</b>	<b>98.30</b>	<b>82,500,000</b>	179,600,000	11.23
4.04.4.04.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				38,500,000	37,100,000		38,500,000	75,600,000	
4.04.4.04.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga	16,000,000.00	16,000,000	44,000,000	44,000,000	100.00	44,000,000	104,000,000	6.50
<b>4.04.4.04.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN BPKAD</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD</b>	<b>278,437,900.00</b>	<b>424,937,900</b>	<b>427,189,800</b>	<b>385,859,009</b>	<b>90.32</b>	<b>441,337,900</b>	1,252,134,809	4.50
4.04.4.04.01.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia	54,183,100.00	101,683,250	116,463,000	105,503,000	90.59	116,463,100	323,649,350	5.97
		Jumlah tenaga kontrak yang tersedia								
4.04.4.04.01.06.02	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1,311,000.00	61,159,750	67,191,000	61,013,000	90.81	67,191,000	189,363,750	144.44

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.04.4.04.01.06.03	Kegiatan penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah	222,943,800.00	262,094,900	243,535,800	219,343,009	90.07	257,683,800	739,121,709	3.32
		Jumlah laporan evaluasi pendapatan asli daerah								
		Jumlah Laporan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Daerah								
		Jumlah Laporan Lembar Rekapitulasi Konfirmasi Transfer (LRKT) Daerah								
		Jumlah laporan piutang daerah								
		Jumlah berita acara rekonsiliasi belanja daerah								
		Jumlah laporan realisasi anggaran								
		Jumlah laporan realisasi anggaran semesteran								
		Jumlah postingan SP2D yang cair								
		Jumlah laporan posisi Kas dan setara kas								
		Jumlah laporan hutang belanja daerah								
4.04.4.04.01.17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Ketepatan Waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD Induk</b>	<b>5,317,555,728.84</b>	<b>4,644,085,805</b>	<b>5,553,579,490</b>	<b>5,119,865,874</b>	<b>92.19</b>	<b>5,194,685,490</b>	<b>14,958,637,169</b>	<b>2.81</b>
		Ketepatan Waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD perubahan								
		Prosentase OPD tepat waktu dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan belanja								
		Ketepatan Waktu laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi								
		Ketepatan waktu laporan keuangan OPD yang terkonsolidasi								
		Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah								
		Prosentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu								
4.04.4.04.01.17.02	Kegiatan penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang tersedia	64,803,200.00	64,803,200	64,803,200	40,803,200	62.96	64,803,200	170,409,600	2.63
4.04.4.04.01.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah RKA dan DPA pendapatan daerah yang disusun	514,625,500.00	73,020,000	501,520,000	498,520,000	99.40	489,520,000	1,061,060,000	2.06



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah RKA dan DPA belanja tidak langsung yang disusun								
		Jumlah RKA dan DPA belanja langsung yang disusun								
4.04.4.04.01.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah RKA dan DPA pendapatan daerah yang disusun	106,857,000.00	150,403,600	174,330,000	146,264,970	83.90	174,330,000	470,998,570	4.41
		Jumlah RKA dan DPA belanja tidak langsung yang disusun								
		Jumlah RKA dan DPA belanja langsung yang disusun								
4.04.4.04.01.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan yang disusun	536,455,500.00	78,375,000	498,750,000	493,750,000	99.00	510,750,000	1,082,875,000	2.02
		Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja tidak langsung yang disusun								
		Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan langsung yang disusun								
4.04.4.04.01.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan yang disusun	81,081,600.00	124,846,600	125,922,600	125,907,600	99.99	148,554,600	399,308,800	4.92
		Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja tidak langsung yang disusun								
		Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja langsung yang disusun								
4.04.4.04.01.17.10	Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan PERDA	91,828,400.00	119,496,600	91,838,000	88,074,400	95.90	91,838,000	299,409,000	3.26
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran								
		Jumlah berita acara Rekonsiliasi Laporan Operasional								
4.04.4.04.01.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Peraturan kepala daerah yang disusun	57,959,000.00	85,499,100	110,447,000	105,036,000	95.10	96,299,000	286,834,100	4.95
4.04.4.04.01.17.16	Kegiatan Peningkatan Manajemen aset /Barang Daerah	Jumlah penyusunan RKB dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	417,461,200.00	282,791,200	545,511,200	495,311,400	90.80	416,261,200	1,194,363,800	2.86
		Jumlah OPD yang tertib penatausahaan persediaan dan aset lainnya								
		Jumlah laporan inventaris aset lainnya								
		Jumlah laporan stok opname persediaan								
		Jumlah OPD yang tertib penatausahaan aset tetap								

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah laporan inventaris aset tetap								
4.04.4.04.01.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terdata	1,982,191,200.00	2,420,514,662	2,056,523,200	1,986,612,500	96.60	2,056,523,200	6,463,650,362	3.26
		Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan								
		Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan kepada wajib pajak								
		Jumlah SSPD BPHTB disampaikan kepada wajib pajak								
4.04.4.04.01.17.22	Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan OPD	Jumlah OPD mendapat pemeliharaan software aplikasi SIMDA keuangan	171,830,978.84	239,674,670	246,273,000	240,067,500	97.48	198,641,000	678,383,170	3.95
4.04.4.04.01.17.23	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Bersumber dari Pajak Daerah Lainnya	Jumlah wajib pajak daerah lainnya yang terdata	1,244,236,150.00	946,307,773	1,086,732,650	849,527,664	78.17	896,236,650	2,692,072,087	2.16
		Jumlah wajib pajak daerah lainnya yang ditetapkan								
		Jumlah tersebarnya SKPD dan SPTPD Pajak Daerah Lainnya								
		Jumlah WP yang mematuhi kewajiban membayar pajak daerah lainnya tepat waktu								
		Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya								
4.04.4.04.01.17.25	Pengelolaan Gaji PNSD	Jumlah SP2D belanja gaji yang terbit tepat waktu	48,226,000.00	58,353,400	50,928,640	49,990,640	98.16	50,928,640	159,272,680	3.30
<b>4.04.4.04.01.18</b>	<b>PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA</b>		<b>134,580,640.00</b>	<b>172,930,119</b>	<b>238,078,000</b>	<b>228,718,816</b>	<b>96.07</b>	<b>238,078,000</b>	<b>639,726,935</b>	<b>4.75</b>
4.04.4.04.01.18.06	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah SP2D belanja langsung yang terbit tepat waktu	134,580,640.00	172,930,119	238,078,000	228,718,816	96.07	238,078,000	639,726,935	4.75
		Jumlah SP2D belanja tidak langsung non gaji yang terbit tepat waktu								

Negara, 5 Maret 2020  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si**  
NIP. 19691119 199603 1 006

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana**

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)			(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17
	<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			5,995,717,000	11,517,377,244	6,705,033,194	7,487,117,139	5,739,325,647	9,948,124,274	6,450,671,681	6,965,178,991	6,705,033,194	9,923,251,193	
I	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	443,542,500	611,223,550	628,296,000	681,056,000	440,261,652	564,269,070	604,971,735	652,079,159	628,296,000	691,125,600	
1	Jumlah tersedianya paket pengiriman Jumlah tersedianya materai			3,000,000	5,300,000	5,600,000	5,600,000	3,000,000	5,343,500	5,236,500	5,579,000	5,600,000	6,160,000	
2	Tersedianya Jaringan komunikasi yang memadai			26,400,000	25,440,000	29,450,000	29,450,000	23,477,552	21,996,199	21,461,071	19,000,341	29,450,000	32,395,000	
3	Jumlah tersedianya tenaga cleaning service			26,866,800	12,780,000			30,196,800	12,780,000					
4	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			37,500,000				37,330,000						
5	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor			46,999,700	52,195,950	52,780,000	52,780,000	59,785,700	48,353,500	46,507,500	52,522,000	52,780,000	58,058,000	
6	Jumlah barang cetakan yang tersedia Jumlah foto copy yang tersedia			23,793,000	17,000,000	14,920,000	18,780,000	20,572,600	16,999,400	17,181,500	17,688,600	14,920,000	16,412,000	
7	Jumlah jenis alat listrik penerangan bangunan kantor				10,325,600	12,240,000	12,240,000		10,175,000	12,240,000	12,220,000	12,240,000	13,464,000	
8	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			2,533,000				2,283,000						
9	Jumlah makan dan minum rapat Jumlah makan dan minum tamu			34,725,000	45,450,000	82,066,000	72,066,000	33,720,000	45,375,000	80,013,000	65,507,000	82,066,000	90,272,600	
10	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat/kooordinasi/ konsultasi			204,400,000	362,240,000	362,240,000	376,140,000	194,796,000	339,974,471	347,324,464	375,662,418	362,240,000	398,464,000	
11	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara keagamaan dan pelaksanaan tirta yatra			37,325,000	80,492,000.00	69,000,000	114,000,000	35,100,000	63,272,000	75,007,700	103,899,800	69,000,000	75,900,000	
II	<b>Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	234,922,400	605,153,500	384,872,150	504,713,749	292,052,328	515,696,588	587,746,122	497,556,134	384,872,150	2,971,074,045	
1	Jumlah Kendaraan dinas yang tersedia									223,000,000				
2	Jumlah pembangunan gedung Kantor yang yang tersedia					50,000,000						50,000,000	2,500,000,000	
3	Jumlah peralatan kerja kantor yang terpelihara			63,000,000				124,100,000						
4	Jumlah tersedianya jasa cleaning service			58,380,000	265,600,000.00	38,441,200	211,596,400	46,370,000	245,776,000	42,471,000	211,291,105	38,441,200	60,000,000	
5	Jumlah tersedianya alat kebersihan kantor													
6	Jumlah unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah BBM untuk operasional yang diadakan			113,542,400	205,887,500.00	209,700,000	198,625,000	121,582,328	152,319,588	191,126,122	196,818,029	209,700,000	290,670,000	
7	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara				108,416,000.00	9,250,000	9,250,000		102,101,000	13,350,000	8,500,000.00	9,250,000	10,175,000	
8	Jumlah peralatan kerja yang diservis /di perbaiki				25,250,000.00	77,480,950	85,242,349		15,500,000	117,799,000	80,947,000	77,480,950	110,229,045	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17
III	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya		Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	16,000,000	16,000,000	54,500,000	82,500,000	22,825,000	16,000,000	16,000,000	81,100,000	54,500,000	59,950,000	
1	Jumlah pakaian dinas					38,500,000	38,500,000				37,100,000	38,500,000	42,350,000	
2	Jumlah pakaian olah raga			16,000,000	16,000,000	16,000,000	44,000,000	22,825,000	16,000,000	16,000,000	44,000,000	16,000,000	17,600,000	
IV	Prosentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD		Prosentase peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	64,115,000	289,290,150	467,059,400	427,189,900	63,756,000	274,084,524	424,937,900	385,859,009	467,059,400	513,765,340	
1	Jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia Jumlah tenaga kontrak yang tersedia			64,115,000	83,099,600.00	116,463,000	116,463,000	63,756,000	80,240,800	101,683,250	105,503,000	116,463,000	128,109,300	
2	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				11,326,550.00	67,197,800	67,191,000		8,762,500	61,159,750	61,013,000	67,197,800	73,917,580	
3	Jumlah berita acara rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah  Jumlah laporan evaluasi pendapatan asli daerah Jumlah Laporan Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Daerah  Jumlah Laporan Lembar Rekapitulasi Konfirmasi Transfer (LRKT) Daerah Jumlah laporan piutang daerah Jumlah berita acara rekonsiliasi belanja daerah Jumlah laporan realisasi anggaran Jumlah laporan realisasi anggaran semesteran Jumlah postingan SP2D yang cair Jumlah laporan posisi Kas dan setara kas Jumlah laporan hutang belanja daerah				194,864,000.00	283,398,600	243,535,900		185,081,224	262,094,900	219,343,009	283,398,600	311,738,460	
V	Ketepatan Waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD Induk Ketepatan Waktu dalam pengelolaan keuangan atas dokumen APBD perubahan Prosentase OPD tepat waktu dalam pengelolaan keuangan atas pelaksanaan belanja  Ketepatan Waktu laporan Barang Milik Daerah (BMD) OPD yang terkonsolidasi Ketepatan waktu laporan keuangan OPD yang terkonsolidasi  Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah Prosentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu			5,237,137,100	9,384,208,644	4,995,957,644	5,553,579,490	4,920,430,667	7,979,740,685	4,644,085,805	5,119,865,874	4,995,957,644	5,495,553,408	
1	Jumlah standar harga yang tersedia				72,337,000	64,803,200	64,803,200		51,945,190	64,803,200	40,803,200	64,803,200	71,283,520	
2	Jumlah RKA dan DPA pendapatan daerah yang disusun  Jumlah RKA dan DPA belanja tidak langsung yang disusun  Jumlah RKA dan DPA belanja langsung yang disusun				203,130,500	78,020,000	501,520,000		184,207,121	73,020,000	498,520,000	78,020,000	85,822,000	
3	Jumlah RKA dan DPA pendapatan daerah yang disusun  Jumlah RKA dan DPA belanja tidak langsung yang disusun  Jumlah RKA dan DPA belanja langsung yang disusun				157,209,000	182,124,000	174,330,000		128,420,000	150,403,600	146,264,970	182,124,000	200,336,400	
4	Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan yang disusun				418,765,000	93,677,000	498,750,000		402,342,264	78,375,000	493,750,000	93,677,000	103,044,700	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17
	Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja tidak langsung yang disusun Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan langsung yang disusun													
5	Jumlah RKA dan DPA perubahan pendapatan yang disusun  Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja tidak langsung yang disusun Jumlah RKA dan DPA perubahan belanja langsung yang disusun				136,693,000	139,204,600	125,922,600		112,433,962	124,846,600	125,907,600	139,204,600	153,125,060	
6	Jumlah rancangan PERDA Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah berita acara Rekonsiliasi Laporan Operasional				90,236,000	112,387,000	91,838,000		86,632,324	119,496,600	88,074,400	112,387,000	123,625,700	
7	Jumlah rancangan Peraturan kepala daerah yang disusun				99,310,744	89,906,100	110,447,000		97,060,744	85,499,100	105,036,000	89,906,100	98,896,710	
8	Jumlah penyusunan RKBK dan rencana pemeliharaan barang milik daerah Jumlah OPD yang tertib penatausahaan persediaan dan aset lainnya Jumlah laporan inventaris aset lainnya Jumlah laporan stok opname persediaan Jumlah OPD yang tertib penatausahaan aset tetap Jumlah laporan inventaris aset tetap				738,362,000	298,276,900	545,511,200		693,407,800	282,791,200	495,311,400	298,276,900	328,104,590	
9	Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terdata Jumlah wajib pajak PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan  Jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan kepada wajib pajak Jumlah SSPD BPHTB disampaikan kepada wajib pajak				3,470,461,000	2,654,262,000	2,056,523,200		3,052,317,478	2,420,514,662	1,986,612,500	2,654,262,000	2,919,688,200	
10	Jumlah OPD mendapat pemeliharaan software aplikasi SIMDA keuangan				436,849,500	262,058,500	246,273,000		240,665,800	239,674,670	240,067,500	262,058,500	288,264,350	
11	Jumlah wajib pajak daerah lainnya yang terdata Jumlah wajib pajak daerah lainnya yang ditetapkan Jumlah tersebarnya SKPD dan SPTPD Pajak Daerah Lainnya  Jumlah WP yang mematuhi kewajiban membayar pajak daerah lainnya tepat waktu Jumlah penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya				3,495,420,100	982,831,344	1,086,732,650		2,864,873,202	946,307,773	849,527,664	982,831,344	1,081,114,478	
12	Jumlah SP2D belanja gaji yang terbit tepat waktu				65,434,800	38,407,000	50,928,640		65,434,800	58,353,400	49,990,640	38,407,000	42,247,700	
13	Jumlah penyebaran SKRD Jumlah dokumen dan wajib retribusi yang diverifikasi			2,193,023,300				1,967,963,453						
14	Jumlah penyebaran SPPT dan SKPD untuk tagihan pajak daerah Jumlah dokumen wajib pajak daerah yang terverifikasi Jumlah penanganan keberatan wajib pajak			1,544,438,000				1,466,694,800						
15	Frekuensi pekan panutan pajak daerah perdesaan dan perkotaan			108,360,000				100,278,264						
15	Jumlah wajib pajak daerah yang terdata			537,911,000				515,231,000						
17	Jumlah wajib pajak daerah yang dibina Jumlah wajib retribusi daerah yang dibina			203,350,800				189,296,500						
18	Jumlah wajib pajak daerah yang diawasi Jumlah wajib retribusi daerah yang diawasi			19,194,000				17,862,650						
19	Jumlah sistem yang siap operasional			630,860,000				663,104,000						

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17
VI	Prosentase OPD tertib Administrasi Keuangan Daerah				611,501,400	174,348,000	238,078,000	-	598,333,407	172,930,119	228,718,816	174,348,000	191,782,800	
1	Jumlah SP2D belanja langsung yang terbit tepat waktu				611,501,400	174,348,000	238,078,000		598,333,407	172,930,119	228,718,816	174,348,000	191,782,800	
	Jumlah SP2D belanja tidak langsung non gaji yang terbit tepat waktu													

Negara, 5 Maret 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE, M.Si**  
NIP. 19691119 199603 1 006

**Tabel T-C.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021**  
**Kabupaten Jembrana**

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD				
Kode Rek.	Urusan/OPD/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (Tahun Rencana)		Pagu	Kode Rek.	Urusan/OPD/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (Tahun Rencana)		Pagu
		INDIKATOR					INDIKATOR		
		Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja				Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	
1.00	2.00	3.00	4.00		1.00	2.00	3.00	4.00	
5.	UNSUR PENUNJANG			145,403,861,081.36	5.	UNSUR PENUNJANG			145,403,861,081.36
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			145,403,861,081.36	5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			145,403,861,081.36
5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			145,403,861,081.36	5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			145,403,861,081.36
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD	1.00	8,610,007,248.20	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD	1.00	8,610,007,248.20
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun	1.00		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun	1.00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.00		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	1.00		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	1.00	
5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah yang tersusun	18 Dokumen	56,902,000.00	5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah yang tersusun	18 Dokumen	56,902,000.00
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja dan dokumen Perangkat Daerah lainnya yang tersusun	7 Dokumen	5,000,000.00	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja dan dokumen Perangkat Daerah lainnya yang tersusun	7 Dokumen	5,000,000.00
5.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen	48,902,000.00	5.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen	48,902,000.00
5.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJP OPD yang tersusun	5 dokumen	3,000,000.00	5.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJP OPD yang tersusun	5 dokumen	3,000,000.00
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	7,789,623,648.20	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	7,789,623,648.20
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji , tunjangan dan Tambahan Penghasil PNS	49 orang	7,730,363,648.20	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji , tunjangan dan Tambahan Penghasil PNS	49 orang	7,730,363,648.20
5.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	50,000,000.00	5.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	50,000,000.00
5.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir keuangan yang tersusun	5 dokumen	9,260,000.00	5.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir keuangan yang tersusun	5 dokumen	9,260,000.00

5.02.01.1.03	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan (jenis)	5 Jenis	763,481,600.00	5.02.01.1.03	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan (jenis)	5 Jenis	763,481,600.00
5.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya paket pengiriman, Jumlah tersedianya materi	850 lembar materi 12 Bulan tahun jasa pengiriman	5,852,000.00	5.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya paket pengiriman, Jumlah tersedianya materi	850 lembar materi 12 Bulan tahun jasa pengiriman	5,852,000.00
5.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan komunikasi yang memadai	12 Bln	29,450,000.00	5.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan komunikasi yang memadai	12 Bln	29,450,000.00
5.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Insentif Pajak yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 tahun	-	5.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Insentif Pajak yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 tahun	-
5.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	42 Jenis 5 buah	24,477,900.00	5.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	42 Jenis 5 buah	24,477,900.00
5.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 jenis barang cetakan, 66.000 lembar pengadaan	21,420,000.00	5.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 jenis barang cetakan, 66.000 lembar pengadaan	21,420,000.00
5.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik penerangan bangunan kantor	4 Jenis	12,240,000.00	5.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik penerangan bangunan kantor	4 Jenis	12,240,000.00
5.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan dan pelaksanaan tirta yatra	4 Kali	26,400,000.00	5.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upakara dan upacara keagamaan dan pelaksanaan tirta yatra	4 Kali	26,400,000.00
5.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat	3.500 kotak/ bungkus mamin rapat, 1 tahun mamin tamu	75,828,000.00	5.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat	3.500 kotak/ bungkus mamin rapat, 1 tahun mamin tamu	75,828,000.00
5.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat/kooordinasi/konsultasi	410 OK	267,684,000.00	5.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat/kooordinasi/konsultasi	410 OK	267,684,000.00
5.02.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah tersedianya jasa cleaning service	4 Orang 26 jenis	115,427,200.00	5.02.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah tersedianya jasa cleaning service	4 Orang 26 jenis	115,427,200.00
5.02.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit 13.418 Liter	139,037,500.00	5.02.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit 13.418 Liter	139,037,500.00
5.02.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	20 Unit	10,000,000.00	5.02.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	20 Unit	10,000,000.00
5.02.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis /di perbaiki	4 Jenis	35,665,000.00	5.02.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis /di perbaiki	4 Jenis	35,665,000.00
5.02.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	5.02.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
5.02.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	5.02.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-
5.02.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	5.02.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92	133,932,906,333.16	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92	133,932,906,333.16
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	0.37	-	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	0.37	-



5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen	133,489,038,683.16	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen	133,489,038,683.16
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah buku KUA dan PPAS yang tersusun	100 Buku	75,000,000.00	5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah buku KUA dan PPAS yang tersusun	100 Buku	75,000,000.00
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah buku KUAP dan PPASP yang tersusun	100 Buku	75,000,000.00	5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah buku KUAP dan PPASP yang tersusun	100 Buku	75,000,000.00
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang direviu	40 Dokumen	30,000,000.00	5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang direviu	40 Dokumen	30,000,000.00
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD yang direviu	40 Dokumen	30,000,000.00	5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD yang direviu	40 Dokumen	30,000,000.00
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD yang direviu	40 Dokumen	487,873,478.00	5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD yang direviu	40 Dokumen	487,873,478.00
5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Perda APBD dan Perbub APBD yang tersusun	100 Buku	512,977,100.00	5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Perda APBD dan Perbub APBD yang tersusun	100 Buku	512,977,100.00
5.02.02.2.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Buku Perda APBD Perubahan dan Perbub APBD Perubahan yang tersusun	100 Buku	15,000,000.00	5.02.02.2.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Buku Perda APBD Perubahan dan Perbub APBD Perubahan yang tersusun	100 Buku	15,000,000.00
5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang teknis Penyusunan APBD yang tersusun	10 Eksemplar	12,592,000.00	5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang teknis Penyusunan APBD yang tersusun	10 Eksemplar	12,592,000.00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	15,652,403,305.16	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	15,652,403,305.16
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil retribusi daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	1,604,528,000.00	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil retribusi daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	1,604,528,000.00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa	41 desa	54,831,381,800.00	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa	41 desa	54,831,381,800.00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana untuk Desa (DD) untuk pemerintah desa	41 desa	54,539,683,000.00	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana untuk Desa (DD) untuk pemerintah desa	41 desa	54,539,683,000.00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan khusus (BKK)	41 desa	5,622,600,000.00	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan khusus (BKK)	41 desa	5,622,600,000.00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	106,478,450.00	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen	106,478,450.00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bendaharawan & Penatausahaan keuangan OPD paham pengelolaan keuangan daerah	40 OPD	8,160,750.00	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bendaharawan & Penatausahaan keuangan OPD paham pengelolaan keuangan daerah	40 OPD	8,160,750.00
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	40 OPD	1,813,500.00	5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	40 OPD	1,813,500.00

5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pembiayaan daerah	1 Laporan	16,709,500.00	5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pembiayaan daerah	1 Laporan	16,709,500.00
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah laporan dan perimbangan dan dana transfer	12 Laporan	9,067,500.00	5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah laporan dan perimbangan dan dana transfer	12 Laporan	9,067,500.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	48,226,000.00	5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	48,226,000.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah SP2D yang diterbitkan	1.500 SP2D	2,176,200.00	5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah SP2D yang diterbitkan	1.500 SP2D	2,176,200.00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	5,440,500.00	5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	5,440,500.00
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pedoman penerimaan dan pengeluaran kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	2,720,250.00	5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pedoman penerimaan dan pengeluaran kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	2,720,250.00
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	9,444,000.00	5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	9,444,000.00
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	160 SPD	2,720,250.00	5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	160 SPD	2,720,250.00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen	337,389,200.00	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen	337,389,200.00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun	40 Laporan	12,500,000.00	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun	40 Laporan	12,500,000.00
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tersusun	40 Laporan	49,499,800.00	5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tersusun	40 Laporan	49,499,800.00
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban APBD yang tersusun	40 Dokumen	89,828,400.00	5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban APBD yang tersusun	40 Dokumen	89,828,400.00
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	40 Laporan	9,996,100.00	5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	40 Laporan	9,996,100.00

5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Perda	14,496,000.00	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Perda	14,496,000.00
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah dokumen tanggapan / tindaklanjut LHP BPK atas tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Dokumen	5,699,900.00	5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah dokumen tanggapan / tindaklanjut LHP BPK atas tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Dokumen	5,699,900.00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Perda	52,890,000.00	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Perda	52,890,000.00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pedoman teknis penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	1 Dokumen	75,698,500.00	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pedoman teknis penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	1 Dokumen	75,698,500.00
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedoman teknis pelaporan keuangan pemerintahan daerah	1 Dokumen	15,000,000.00	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedoman teknis pelaporan keuangan pemerintahan daerah	1 Dokumen	15,000,000.00
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kepada OPD tentang Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan	40 OPD	11,780,500.00	5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kepada OPD tentang Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan	40 OPD	11,780,500.00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92	325,804,300.00	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92	325,804,300.00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	11 Dokumen	325,804,300.00	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	11 Dokumen	325,804,300.00
5.02.03.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah penyusunan buku pedoman standarisasi satuan harga tepat waktu	1 Dok	45,357,700.00	5.02.03.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah penyusunan buku pedoman standarisasi satuan harga tepat waktu	1 Dok	45,357,700.00
5.02.03.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	16,805,000.00	5.02.03.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	16,805,000.00
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	16,805,000.00	5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	16,805,000.00
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RPPMD yang tersusun	1 Dokumen	16,800,000.00	5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RPPMD yang tersusun	1 Dokumen	16,800,000.00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	40 OPD	67,220,000.00	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	40 OPD	67,220,000.00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventarisasi BMD	40 OPD	16,805,000.00	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventarisasi BMD	40 OPD	16,805,000.00
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah laporan atas Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	40 OPD	22,182,600.00	5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah laporan atas Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	40 OPD	22,182,600.00

5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40 OPD	36,950,000.00	5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40 OPD	36,950,000.00
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahtanganan BMD	40 OPD	10,083,000.00	5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahtanganan BMD	40 OPD	10,083,000.00
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	40 OPD	16,796,000.00	5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	40 OPD	16,796,000.00
5.02.03.2.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Rekapitulasi BMD	40 OPD	60,000,000.00	5.02.03.2.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Rekapitulasi BMD	40 OPD	60,000,000.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan potensi pajak daerah	15,3 %	2,535,143,200.00	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan potensi pajak daerah	15,3 %	2,535,143,200.00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	0.97		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	0.97	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	0.97		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	0.97	
5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen	2,535,143,200.00	5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen	2,535,143,200.00
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	63,322,500.00	5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	63,322,500.00
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	53,490,000.00	5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	53,490,000.00
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SPPT yang tersebar	132.834 Wajib Pajak	21,107,500.00	5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SPPT yang tersebar	132.834 Wajib Pajak	21,107,500.00
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tersebar SKPD dan SPTPD pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	17,830,000.00	5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tersebar SKPD dan SPTPD pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	17,830,000.00
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem PBB-P2 dan BPHTB	2 Sistem	282,279,800.00	5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem PBB-P2 dan BPHTB	2 Sistem	282,279,800.00
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem Pajak Daerah Lainnya	1 Sistem	35,660,000.00	5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem Pajak Daerah Lainnya	1 Sistem	35,660,000.00
5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	2 Sistem	88,651,500.00	5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	2 Sistem	88,651,500.00
5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 Sistem	42,792,000.00	5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 Sistem	42,792,000.00
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	1.500 Wajib Pajak	25,329,000.00	5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	1.500 Wajib Pajak	25,329,000.00

5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	289 Wajib Pajak	35,660,000.00	5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	289 Wajib Pajak	35,660,000.00
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	1.500 Wajib Pajak	84,430,000.00	5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	1.500 Wajib Pajak	84,430,000.00
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	289 Wajib Pajak	285,280,000.00	5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	289 Wajib Pajak	285,280,000.00
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak PBB-P2	132.834 Wajib Pajak	1,096,443,600.00	5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak PBB-P2	132.834 Wajib Pajak	1,096,443,600.00
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	402,867,300.00	5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	402,867,300.00

Negara, 5 Maret 2020  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE, M.Si.**  
NIP. 19691119 199603 1 006

Tabel T-C.32.  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Kabupaten Jembrana**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana**

[illegible]

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

Kode Rek.	Urusan/OPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2021 (Tahun Rencana)			Pagu Setelah Desk di Bappeda	Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju	Rencana Tahun 2022	Ket
		INDIKATOR		Lokasi Kegiatan				Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Uraian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja							
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	
5.	UNSUR PENUNJANG				145,403,861,081.36			-	159,944,247,189.50	
5.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				145,403,861,081.36			-	159,944,247,189.50	
5.02.0.00.0.00.01.00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				145,403,861,081.36			-	159,944,247,189.50	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Ketersediaan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD	1.00		8,610,007,248.20			1.00	9,471,007,973.02	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun	1.00					1.00	-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	1.00					1.00	-	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan pakaian dinas, pakaian khusus, dan pakaian lapangan beserta kelengkapannya	1.00					1.00	-	
5.02.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah yang tersusun	18 Dokumen		56,902,000.00			18 Dokumen	62,592,200.00	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja dan dokumen Perangkat Daerah lainnya yang tersusun	7 Dokumen	Kab. Jembrana	5,000,000.00	DAU		7 Dokumen	5,500,000.00	
5.02.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 dokumen	Kab. Jembrana	48,902,000.00	DAU		6 dokumen	53,792,200.00	
5.02.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP OPD yang tersusun	5 dokumen	Kab. Jembrana	3,000,000.00	DAU		5 dokumen	3,300,000.00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi akuntansi, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen		7,789,623,648.20			8 Dokumen	8,568,586,013.02	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji , tunjangan dan Tambahan Penghasil PNS	49 orang	Kabupaten Jembrana	7,730,363,648.20	DAU		49 orang	8,503,400,013.02	
5.02.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	jumlah laporan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tersusun	3 Dokumen	Kab. Jembrana	50,000,000.00	DAU		3 Dokumen	55,000,000.00	
5.02.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan akhir keuangan yang tersusun	5 dokumen	Kab. Jembrana	9,260,000.00	DAU		5 dokumen	10,186,000.00	
5.02.01.1.03	Administrasi Umum	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang diadakan (jenis)	5 Jenis		763,481,600.00			5 Jenis	839,829,760.00	
5.02.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tersedianya paket pengiriman, Jumlah tersedianya materai	850 lembar materai 12 Bulann tahun jasa pengiriman	Kab. Jembrana	5,852,000.00	DAU		850 lembar materai 12 Bulann tahun jasa pengiriman	6,437,200.00	
5.02.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jaringan komunikasi yang memadai	12 Bln	Kab. Jembrana	29,450,000.00	DAU		12 Bln	32,395,000.00	
5.02.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Insentif Pajak yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 tahun	Kabupaten Jembrana	-	PAD		1 tahun	-	
5.02.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	42 Jenis 5 buah	Kab. Jembrana	24,477,900.00	DAU		42 Jenis 5 buah	26,925,690.00	

5.02.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	6 jenis barang cetakan, 66.000 lembar pengandaan	Kab. Jembrana	21,420,000.00	DAU		12 Bln	23,562,000.00	
5.02.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik penerangan bangunan kantor	4 Jenis	Kab. Jembrana	12,240,000.00	DAU		4 Jenis	13,464,000.00	
5.02.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara dan upacara keagamaan dan pelaksanaan tirta yatra	4 Kali	Kab. Jembrana	26,400,000.00	DAU		850 lembar materai 12 Bulann tahun jasa pengiriman	29,040,000.00	
5.02.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat	3.500 kotak/ bungkus mamin rapat, 1 tahun mamin tamu	Kab. Jembrana	75,828,000.00	DAU		3.500 kotak/ bungkus mamin rapat, 1 tahun mamin tamu	83,410,800.00	
5.02.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai/ASN yang mengikuti rapat/kooordinasi/ konsultasi	410 OK	Kab. Jembrana	267,684,000.00	DAU		410 OK	294,452,400.00	
5.02.01.1.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah tersedianya jasa cleaning service	4 Orang 26 jenis	Kab. Jembrana	115,427,200.00	DAU		4 Orang 26 jenis	126,969,920.00	
5.02.01.1.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	15 Unit 13.418 Liter	Kab. Jembrana	139,037,500.00	DAU		15 Unit 13.418 Liter	152,941,250.00	
5.02.01.1.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	20 Unit	Kab. Jembrana	10,000,000.00	DAU		20 Unit	11,000,000.00	
5.02.01.1.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diservis /di perbaiki	4 Jenis	Kab. Jembrana	35,665,000.00	DAU		4 Jenis	39,231,500.00	
								-	-	
5.02.01.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				-			0.92	-	
5.02.01.1.04.02	Pengadaan Pakaiannya Beserta Perlengkapannya			Kab. Jembrana		DAU		0.37	-	
5.02.01.1.04.05	Pengadaan Pakaiannya Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Jembrana		DAU		-	-	
								10 Dokumen	-	
								100 Buku	-	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92		133,932,906,333.16			100 Buku	147,326,196,966.48	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kaulitas pengelolaan keuangan daerah	0.37					40 Dokumen	-	
								40 Dokumen	-	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen		133,489,038,683.16			40 Dokumen	146,837,942,551.48	
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah buku KUA dan PPAS yang tersusun	100 Buku	Kab. Jembrana	75,000,000.00	DAU		#REF!	82,500,000.00	
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah buku KUAP dan PPASP yang tersusun	100 Buku	Kab. Jembrana	75,000,000.00	DAU		100 Buku	82,500,000.00	
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang direiuiw	40 Dokumen	Kab. Jembrana	30,000,000.00	DAU		100 Buku	33,000,000.00	
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan OPD yang direiuiw	40 Dokumen	Kab. Jembrana	30,000,000.00	DAU		10 Eksemplar	33,000,000.00	
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen DPA Perubahan OPD yang direiuiw	40 Dokumen	Kab. Jembrana	487,873,478.00	DAU		41 desa	536,660,825.80	



5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Perda APBD dan Perbub APBD yang tersusun	100 Buku	Kab. Jembrana	512,977,100.00	DAU		41 desa	564,274,810.00	
5.02.02.2.01.07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah Buku Perda APBD Perubahan dan Perbub APBD Perubahan yang tersusun	100 Buku	Kab. Jembrana	15,000,000.00	DAU		41 desa	16,500,000.00	
5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang teknis Penyusunan APBD yang tersusun	10 Eksemplar	Kab. Jembrana	12,592,000.00	DID		41 desa	13,851,200.00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil pajak daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	Desa se Kabupaten Jembrana	15,652,403,305.16	PAD : 4.398.200.601,2, BHP : 1.600.035.400, B.HPKB : 4.070.785.333, BBNKB : 3.038.729.738,- PBKB : 2.544.453.333,- BH. Air P : 20.149.800		41 desa	17,217,643,635.68	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima bagi hasil retribusi daerah Kabupaten Jembrana	41 desa	Desa se Kabupaten Jembrana	1,604,528,000.00	retribusi daerah		8 Dokumen	1,764,980,800.00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa	41 desa	Desa se Kabupaten Jembrana	54,831,381,800.00	DAU		40 OPD	60,314,519,980.00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah desa yang menerima Alokasi Dana untuk Desa (DD) untuk pemerintah desa	41 desa	Desa se Kabupaten Jembrana	54,539,683,000.00	DD		40 OPD	59,993,651,300.00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Desa yang menerima bantuan keuangan khusus (BKK)	41 desa	Desa se Kabupaten Jembrana	5,622,600,000.00	DAU		1 Laporan	6,184,860,000.00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah yang tersusun (dokumen)	8 Dokumen		106,478,450.00			12 Laporan	117,126,295.00	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Bendaharawan & Penatausahaan keuangan OPD paham pengelolaan keuangan daerah	40 OPD	Kab. Jembrana	8,160,750.00	DAU		12 Laporan	8,976,825.00	
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	40 OPD	Kab. Jembrana	1,813,500.00	DID		1.500 SP2D	1,994,850.00	
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pembiayaan daerah	1 Laporan	Kab. Jembrana	16,709,500.00	DAU		40 OPD	18,380,450.00	
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Jumlah laporan dan perimbangan dan dana transfer	12 Laporan	Kab. Jembrana	9,067,500.00	DID		1 Dokumen	9,974,250.00	

5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Laporan pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Kab. Jembrana	48,226,000.00	-		40 OPD	53,048,600.00	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Jumlah SP2D yang diterbitkan	1.500 SP2D	Kab. Jembrana	2,176,200.00	DAU		160 SPD	2,393,820.00	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	Kab. Jembrana	5,440,500.00	DID		-	5,984,550.00	
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pedoman penerimaan dan pengeluaran kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	1 Dokumen	Kab. Jembrana	2,720,250.00	DID		10 Dokumen	2,992,275.00	
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Pemahaman Bendaharawan & Penatausahaan Keuangan OPD dalam pengelolaan Gaji	40 OPD	Kab. Jembrana	9,444,000.00	DAU		40 Laporan	10,388,400.00	
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang ditebitkan	160 SPD	Kab. Jembrana	2,720,250.00	DID		40 Laporan	2,992,275.00	
								40 Dokumen	-	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun (dokumen)	10 Dokumen		337,389,200.00			40 Laporan	371,128,120.00	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun	40 Laporan	Kab. Jembrana	12,500,000.00	DAU		1 Perda	13,750,000.00	
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tersusun	40 Laporan	Kab. Jembrana	49,499,800.00	DAU		1 Dokumen	54,449,780.00	
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban APBD yang tersusun	40 Dokumen	Kab. Jembrana	89,828,400.00	DAU		1 Perda	98,811,240.00	
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	40 Laporan	Kab. Jembrana	9,996,100.00	DAU		1 Dokumen	10,995,710.00	

5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Perda	Kab. Jembrana	14,496,000.00	DAU		1 Dokumen	15,945,600.00	
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah dokumen tanggapan / tindakan lanjut LHP BPK atas tentang Pertanggungjawaban APBD yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Jembrana	5,699,900.00	DAU		40 OPD	6,269,890.00	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Perda	Kab. Jembrana	52,890,000.00	DAU		-	58,179,000.00	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pedoman teknis penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	1 Dokumen	Kab. Jembrana	75,698,500.00	DID		0.92	83,268,350.00	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pedoman teknis pelaporan keuangan pemerintahan daerah	1 Dokumen	Kab. Jembrana	15,000,000.00	DAU		-	16,500,000.00	
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kepada OPD tentang Penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan	40 OPD	Kab. Jembrana	11,780,500.00	DAU		11 Dokumen	12,958,550.00	
								1 Dok	-	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tersedianya dokumen APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya	0.92		325,804,300.00			1 Dokumen	358,384,730.00	
								1 Dokumen	-	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah yang tersusun (dokumen)	11 Dokumen		325,804,300.00			1 Dokumen	358,384,730.00	
5.02.03.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah penyusunan buku pedoman standarisasi satuan harga tepat waktu	1 Dok	Kab. Jembrana	45,357,700.00	DAU		40 OPD	49,893,470.00	
5.02.03.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Jembrana	16,805,000.00	DD		40 OPD	18,485,500.00	
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Jembrana	16,805,000.00	DD		40 OPD	18,485,500.00	
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RPPMD yang tersusun	1 Dokumen	Kab. Jembrana	16,800,000.00	DD		40 OPD	18,480,000.00	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD	40 OPD	Kab. Jembrana	67,220,000.00	DD		40 OPD	73,942,000.00	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventarisasi BMD	40 OPD	Kab. Jembrana	16,805,000.00	DD		40 OPD	18,485,500.00	
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah laporan atas Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	40 OPD	Kab. Jembrana	22,182,600.00	DAU		40 OPD	24,400,860.00	

5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40 OPD	Kab. Jembrana	36,950,000.00	DD		-	40,645,000.00	
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahtanganan BMD	40 OPD	Kab. Jembrana	10,083,000.00	DD		15,3 %	11,091,300.00	
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	40 OPD	Kab. Jembrana	16,796,000.00	DD		0.97	18,475,600.00	
5.02.03.2.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Rekapitulasi BMD	40 OPD	Kab. Jembrana	60,000,000.00	DAU		0.97	66,000,000.00	
								-	-	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan potensi pajak daerah	15,3 %		2,535,143,200.00			7 Dokumen	2,788,657,520.00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	0.97					2 Dokumen	-	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase wajib pajak yang melaksanakan kewajiban tepat waktu	0.97					2 Dokumen	-	
								132.834 Wajib Pajak	-	
5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun (dokumen)	7 Dokumen		2,535,143,200.00			289 Wajib Pajak	2,788,657,520.00	
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	Kab. Jembrana	63,322,500.00	DAU		2 Sistem	69,654,750.00	
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pendapatan daerah	2 Dokumen	Kab. Jembrana	53,490,000.00	DAU		1 Sistem	58,839,000.00	
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah SPPT yang tersebar	132.834 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	21,107,500.00	DAU		2 Sistem	23,218,250.00	
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah tersebarnya SKPD dan SPTPD pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	17,830,000.00	DAU		1 Sistem	19,613,000.00	
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem PBB-P2 dan BPHTB	2 Sistem	Kab. Jembrana	282,279,800.00	DAU		1.500 Wajib Pajak	310,507,780.00	
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah sistem Pajak Daerah Lainnya	1 Sistem	Kab. Jembrana	35,660,000.00	DAU		289 Wajib Pajak	39,226,000.00	
5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	2 Sistem	Kab. Jembrana	88,651,500.00	DAU		1.500 Wajib Pajak	97,516,650.00	

5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah aplikasi yang terpelihara	1 Sistem	Kab. Jembrana	42,792,000.00	DAU		289 Wajib Pajak	47,071,200.00	
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	1.500 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	25,329,000.00	DAU		132.834 Wajib Pajak	27,861,900.00	
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mendapat pelayanan	289 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	35,660,000.00	DAU		289 Wajib Pajak	39,226,000.00	
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	1.500 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	84,430,000.00	DAU		-	92,873,000.00	
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terverifikasi	289 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	285,280,000.00	DAU		-	313,808,000.00	
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak PBB-P2	132.834 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	1,096,443,600.00	DAU		-	1,206,087,960.00	
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak yang mematuhi kewajiban membayar pajak daerah lainnya	289 Wajib Pajak	Kab. Jembrana	402,867,300.00	DAU		-	443,154,030.00	

Negara, 5 Maret 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah Kabupaten Jembrana



**I Dewa Gde Kusuma Antara, SE.M.Si.**

NIP. 19691119 199603 1 006